



GUBERNUR JAWA TENGAH  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 53 TAHUN 2012  
TENTANG  
PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penataan kearsipan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2004 tentang Pedoman Pola Klaisifikasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 5 Seri E Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Kearsipan Di Daerah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi Dan Tata Kerja Badan Arsip Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I  
PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP

Pasal 1

Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Pedoman Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi kode-kode dalam bentuk numerik yang disusun berdasarkan masalah, yang mencerminkan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

BAB II  
PEMBIAYAAN

Pasal 3

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2004 tentang Pedoman Pola Klasifikasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 90), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 22 Nopember 2012

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 22 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

HADI PRABOWO

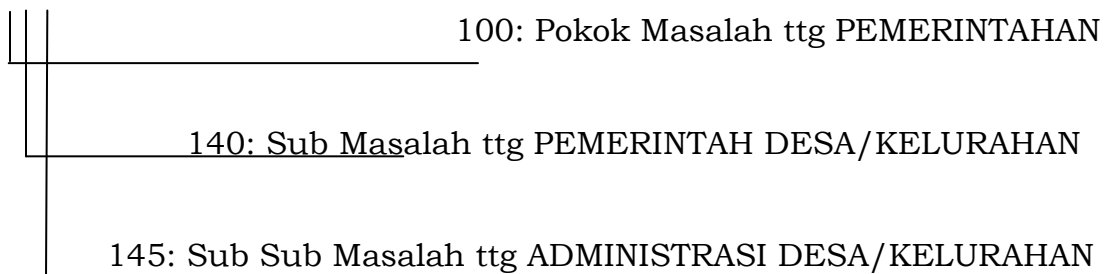
LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 53 TAHUN 2012  
TENTANG PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI  
JAWA TENGAH

PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

I. UMUM

1. Klasifikasi kearsipan disusun berdasarkan masalah, mencerminkan fungsi dan kegiatan pelaksanaan tugas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2. Klasifikasi diperinci secara desimal, dengan mempergunakan tiga angka dasar.
3. Klasifikasi disusun secara berjenjang dengan mempergunakan prinsip perkembangan dari umum kepada khusus dalam hubungan masalah, dengan penulisan klasifikasi sebagai berikut:

**145**



4. Rincian Klasifikasi yang menampung masalah-masalah fasilitatif dan substantif SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, adalah

**000 UMUM**

010 URUSAN DALAM

020 BARANG DAN JASA

030 KEKAYAAN DAERAH

040 PERPUSTAKAAN/DOKUMEN/KEARSIPAN/SANDI

050 PERENCANAAN DAN EVALUASI

060 ORGANISASI/KETATALAKSANAAN

070 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

080 KONPERENSI/RAPAT KOORDINASI

090 PERJALANAN DINAS

**100 PEMERINTAHAN**

110 PEMERINTAHAN PUSAT

120 PEMERINTAHAN PROVINSI

130 PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA

140 PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN

150 LEGISLATIF MPR/DPR/DPD

160 DPRD PROVINSI

170 DPRD KABUPATEN/KOTA

180 HUKUM

190 HUBUNGAN LUAR NEGERI

**200 POLITIK**

- 210 KEPARTAIAN
- 220 ORGANISASI KEMASYARAKATAN
- 230 ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL
- 240 ORGANISASI PEMUDA
- 250 ORGANISASI BURUH, TANI DAN NELAYAN
- 260 ORGANISASI WANITA
- 270 PEMILU, PILKADA
- 280 PENGAWASAN PEMILU/PILKADA

**300 KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM**

- 310 PERTAHANAN
- 320 KEMILITERAN/TNI
- 330 KEAMANAN
- 340 PERLINDUNGAN MASYARAKAT
- 350 KEJAHATAN
- 360 BENCANA
- 370 KECELAKAAN
- 380 PENDAMPINGAN, REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
- 390 KERJASAMA BPBD DENGAN INSTANSI LAIN

**400 KESEJAHTERAAN RAKYAT**

- 410 PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN
- 420 PENDIDIKAN
- 426 Keolahragaan
- 427 Kepemudaan
- 430 KEBUDAYAAN
- 440 KESEHATAN
- 445 RSU, RSJ, RS Khusus
- 450 AGAMA
- 460 SOSIAL
- 470 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
- 475 Transmigrasi
- 476 Keluarga Berencana
- 480 MEDIA MASSA

**500 PEREKONOMIAN**

- 510 PERDAGANGAN
- 518 Koperasi
- 520 PERTANIAN
- 522 Kehutanan
- 523 Perikanan Dan Kelautan
- 524 Peternakan Dan Kesehatan Hewan
- 525 Perkebunan
- 526 Ketahanan Pangan
- 527 Penyuluhan
- 530 PERINDUSTRIAN
- 540 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
- 550 PERHUBUNGAN
- 554 Pos
- 555 Teknologi Informasi

556 Pariwisata Dan Rekreasi  
557 Meteorologi  
560 TENAGA KERJA  
570 PENANAMAN MODAL  
580 PERBANKAN MONETER  
590 AGRARIA  
**600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN**  
610 PENGAIRAN  
620 JALAN  
630 JEMBATAN  
640 BANGUNAN  
650 TATA RUANG KOTA  
660 TATA LINGKUNGAN  
670 KETENAGAAN  
680 PERALATAN PEKERJAAN UMUM  
690 AIR MINUM  
**700 PENGAWASAN**  
710 BIDANG PEMERINTAHAN  
720 BIDANG POLITIK  
730 BIDANG KEAMANAN/KETERTIBAN  
740 BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT  
750 BIDANG PEREKONOMIAN  
760 BIDANG PEKERJAAN UMUM  
770 PENGAWASAN PEJABAT PUBLIK  
780 BIDANG KEPEGAWAIAN  
790 BIDANG KEUANGAN  
**800 KEPEGAWAIAN**  
810 PENGADAAN  
820 MUTASI  
830 KEDUDUKAN  
840 KESEJAHTERAAN PEGAWAI  
850 CUTI  
860 PENILAIAN  
870 TATA USAHA KEPEGAWAIAN  
880 PEMBERHENTIAN  
890 PENDIDIKAN PEGAWAI  
**900 KEUANGAN**  
910 ANGGARAN  
920 AKUNTANSI  
930 PERBENDAHARAAN  
940 PEMBINAAN KEBENDAHARAAN  
950 PENGELOLAAN KAS DAERAH  
960 EVALUASI DAN PENGENDALIAN  
970 PENDAPATAN

## II. RINCIAN

<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
<b>000</b>	<b>UMUM</b>
001	Lambang
001.1	Garuda
001.2	Bendera Kebangsaan
001.3	Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)
001.4	Bandir/Umbul-umbul
002	Tanda kehormatan/penghargaan ( khusus untuk Non PNS)
002.1	Bintang
002.2	Satyalencana
002.3	Satyakarya Nugraha
002.4	Penghargaan secara adat
002.5	Penghargaan lainnya (Kalpataru, Upakarti, Adipura dsb)
003	Hari Raya/Besar
003.1	Nasional (17 Agustus, Hari Pahlawan, Hari Anak, HKSN dsb)
003.2	Keagamaan
003.3	Hari Ulang Tahun/HUT (Hari jadi Provinsi/Kab/Kota)
004	Ucapan
004.1	Terima kasih
004.2	Selamat
004.3	Mohon diri
004.4	Bela sungkawa
004.5	Ucapan lainnya
005	Undangan
006	Tanda Jabatan
006.1	Pamong Praja
006.2	Pejabat lainnya
<b>010</b>	<b>URUSAN DALAM</b>
011	Gedung kantor, termasuk instalasi
011.1	Listrik
011.2	Telepon
011.3	Otomasi
011.4	Air Minum
011.5	Hidrant
011.6	Alarm
011.7	Internet
012	Rumah Dinas
013	Akomodasi/Persinggahan (mess/wisma/hotel)
014	Rumah susun/apartemen
015	Peminjaman sarana prasarana kantor (ruangan, gedung, kendaraan, LCD, laptop dll)
016	Pengurusan kendaraan dinas
017	Keamanan/ketertiban kantor
018	Kebersihan kantor
019	Protokol
019.1	Upacara bendera
019.2	Tata tempat
019.21	Pemasangan gambar Presiden/Wakil Presiden
019.3	Audiensi
019.4	Penerimaan Tamu
019.5	Kerjasama
<b>020</b>	<b>BARANG DAN JASA</b>

021	Penawaran
021.1	Penawaran barang
021.2	Penawaran jasa
022	Barang
022.1	Barang bergerak
022.2	Barang tidak bergerak
023	Jasa
024	-
025	-
026	-
027	Pengadaan termasuk pengumuman pengadaan, penunjukan, lelang.
027.1	Prakualifikasi : rapat persiapan, HPS, penjelasan pekerjaan/anwizing, negoisasi, evaluasi
027.2	SPK,Kontrak/Amandemen/Addendum, Teguran
027.3	Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
027.4	Serah terima pekerjaan
027.5	Pemeriksaan pekerjaan
027.6	Perpanjangan waktu/force majore
027.7	Denda
027.8	Sanggahan
027.9	Pemeliharaan barang/jasa
028	Inventaris
028.1	Pendataan Barang Milik Negara
028.2	Pemeliharaan Barang Milik Negara
028.3	Penghapusan Barang Milik Negara
<b>030</b>	<b>KEKAYAAN DAERAH</b>
031	Barang-Barang tidak bergerak (tanah, perkebunan, pertanian, hutan, tambak)
032	Barang-Barang tidak bergerak (gedung, asrama, monumen /bangunan bersejarah dll)
033	Tanaman
034	Alat-Alat Berat
035	Hewan
036	Barang Persediaan Dalam Gudang
037	Alat Pengangkut (Darat, Laut, Udara)
038	Peralatan Pabrik, Laboratorium
039	Peralatan Kesehatan/Medis (Rumah Sakit, Balai Pengobatan)
<b>040</b>	<b>PERPUSTAKAAN/DOKUMEN/KEARSIPAN/SANDI</b>
041	Perpustakaan
041.1	Pameran Bahan Perpustakaan
041.2	Pengolahan (Katalog, Bibliografi)
041.3	Sirkulasi/layanan
041.31	Keanggotaan
041.32	Peminjaman dan pengembalian
041.4	Deposit
041.5	Pemeliharaan, Pelestarian/alih media
041.6	Pembinaan Perpustakaan
041.61	Bantuan buku, rak
041.7	Penghapusan/penyusutan bahan perpustakaan
041.8	Jenis-jenis Perpustakaan (Umum, Khusus, PT, Sekolah, Keliling, Masyarakat)
041.9	Kemitraan, Forum Perpustakaan, Kerjasama antar Perpustakaan
042	Dokumentasi
043	-



044	-
045	Kearsipan
045.1	Pola Klasifikasi
045.2	Akuisisi Arsip
045.3	Penyusutan Arsip
045.31	Jadwal Retensi Arsip
045.32	Penilaian Arsip
045.33	Pemindahan Arsip
045.34	Penyerahan Arsip
045.35	Pemusnahan Arsip
045.4	Pembinaan Kearsipan
045.41	Pengawasan
045.42	Bimbingan Kearsipan
045.5	Pemeliharaan, Pelestarian/Konservasi Arsip
045.51	Fumigasi dan Termit Control
045.52	Laminasi
045.53	Alih Media
045.6	Layanan
045.7	Pemasyarakatan
045.71	Pameran
045.72	Penerbitan Naskah Sumber Arsip
045.73	Sosialisasi Kearsipan
045.8	Pengembangan Sistem
045.81	Sistem Kearsipan
045.82	Sistem Jaringan Informasi Kearsipan
046	Sandi
047	Telegram, Telex, Radio, ISB
048	Data Elektrolit
049	-
<b>050</b>	<b>PERENCANAAN DAN EVALUASI</b>
	meliputi RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional), RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), Musrenbang, Musrenbangpus antar Kementerian, Musrenbangnas, Musrenbangdes
050.1	RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional)
050.11	RENSTRA (Rencana Strategi)
050.12	RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah)
050.13	RENSTRA BAPPEDA
050.2	Program Nasional
050.21	RKP (Rencana Kerja Pembangunan)
050.22	RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga)
050.23	RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah)
050.24	Rencana Kerja SKPD
050.25	KUA (Kebijakan Umum Anggaran), KUPA (Kebijakan Umum Perubahan Anggaran) dan PPAS (Penetapan Plafon Anggaran Sementara)
050.26	Jawaban Gubernur atas pandangan fraksi
050.27	Nota keuangan
050.28	RKT (Rencana Kerja Tahunan)
050.29	RKO (Rencana Kerja Operasional)
051	Laporan
051.1	Laporan berkala
051.2	LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
052	Evaluasi
052.1	Evaluasi Rencana Strategis

052.11	Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
052.12	Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah
052.13	Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota
053.14	Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
<b>060</b>	<b>ORGANISASI/KETATALAKSANAAN</b>
061	Organisasi
061.1	Susunan Organisasi dan Tata Kerja
061.2	Tata tertib kantor, termasuk pengaturan hari dan jam kerja pegawai
062	Organisasi Badan Non Pemerintah
063	Organisasi Badan Internasional
064	Organisasi semi pemerintah
065	Ketatalaksanaan
065.1	Tata Naskah Dinas
065.2	Stempel dinas dan stempel jabatan
065.3	Papan nama instansi pemerintah/non pemerintah
065.4	Alamat-alamat kantor dan pejabat
065.5	Ketentuan pakaian dinas dan atribut
066	Tata Hubungan Kerja
067	Standart Operasional Prosedur
068	Evaluasi dan Laporan Ketatalaksanaan
069	Analisis Jabatan
069.1	Pengukuran/Penilaian beban kerja Jabatan Sruktural dan Fungsional
069.2	Uraian Jabatan
<b>070</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>
071	Riset meliputi perijinan bagi peneliti, riset design, pembahasan sampai dengan laporan akhir riset
072	Pengembangan
072.1	Krenova (Kreativitas dan Inovasi Masyarakat)
072.2	SINAS (Sistem Inovasi Nasional)
072.3	SIDA (Sistem Inovasi Daerah) meliputi cluster, Kab/Kota, desa inovatif
072.4	Inkubator Tehnologi dan Bisnis
072.5	Pameran produk inovasi/Ristek
072.6	BTC (Bisnis Teknologi Center)
072.7	Raptek (Penerapan Iptek)
072.8	HKI (Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual)
073	Kajian
073.1	Kajian strategis/diskusi/Forum Group Discussion (FGD)
073.2	Seminar
073.3	Workshop
073.4	Rapat Koordinasi/Rapat Teknis
073.5	Lokakarya
073.6	Diseminasi/sosialisasi hasil penelitian
074	Kerjasama Penelitian
074.1	Instansi Pemerintah Pusat/Daerah
074.2	Perguruan Tinggi Negeri/Swasta
074.3	Lembaga Swasta Nasional, Lembaga Swadaya Masyarakat
074.4	Lembaga Internasional
075	Perekayasaan
076	Jarlitbang (Jaringan Penelitian dan Pengembangan)
077	Publikasi Ilmiah

077.1	Jurnal Ilmiah
<b>080</b>	<b>KONPERENSI/RAPAT KOORDINASI</b>
081	Gubernur
082	Bupati/Walikota
083	Komponen Eselon lainnya (termasuk Pimpinan SKPD)
084	Instansi lainnya (diluar Kemendagri)
085	International di dalam negeri
086	International di luar negeri
<b>090</b>	<b>PERJALANAN DINAS</b>
091	Perjalanan Presiden/Wakil Presiden ke Daerah
092	Perjalanan Menteri Ke Daerah
093	Perjalanan Pejabat Tinggi (Pejabat Eselon I)
094	Perjalanan PNS, meliputi Surat Perintah Tugas(SPT) dan Surat Tugas
095	Perjalanan Tamu Asing ke Daerah
096	Perjalanan Presiden/Wakil Presiden ke Luar Negeri
097	Perjalanan Menteri ke Luar Negeri
098	Perjalanan Pejabat Tinggi ke Luar Negeri
099	Perjalanan Pegawai ke Luar Negeri
<b>100</b>	<b>PEMERINTAHAN</b>
<b>110</b>	<b>PEMERINTAHAN PUSAT</b>
111	Presiden, meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah dan serah terima jabatan.
111.1	Pertanggung jawaban Presiden kepada MPR
111.2	Amanat Presiden/Amanat Kenegaraan
112	Wakil Presiden, meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah dan serah terima jabatan.
113	Susunan Kabinet
113.1	Reshufle
113.2	Penunjukan Menteri ad Intern
113.3	Sidang Kabinet, Sidang Stabilitas Ekonomi, lihat 500.1
114	Kementerian Dalam Negeri
114.1	Amanat Menteri Dalam Negeri
115	Kementerian lainnya
116	Lembaga Tinggi Negara (DPA, MA, BPK)
117	Lembaga Non Kementerian
118	Otonomi Daerah
119	Kerjasama antar Kementerian
<b>120</b>	<b>PEMERINTAH PROVINSI</b>
120.01	Kebijakan Pemerintah Provinsi
120.02	Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Gubernur (LKPJ)
120.03	Monografi, tambahkan kode wilayah
120.1	Koordinasi
120.11	Satuan Kerja Perangkat Daerah
120.12	Instansi Vertikal
120.13	Kerjasama antar Provinsi/Daerah, dan Luar Negeri
121	Gubernur, meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya
122	Wakil Gubernur, meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya
123	Sekretaris Daerah, meliputi pencalonan, serah terima jabatan
124	Badan-badan Pertimbangan Daerah, meliputi Muspida
125	Pembentukan/Pemekaran
125.1	Pembentukan Daerah Otonom

125.2	Pembentukan Wilayah
125.3	Perubahan Batas Wilayah
125.4	Pemekaran Wilayah
125.5	Permasalahan Batas Wilayah
125.6	Pemindahan Ibukota Provinsi
125.7	Pemberian dan penggantian nama kota, daerah, jalan
126	Pembagian Wilayah
127	Penyerahan Urusan
<b>130</b>	<b>PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA</b>
130.01	Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota
130.02	Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Bupati/Walikota (LKPJ)
130.03	Monografi
130.1	Koordinasi
130.11	Satuan Kerja Perangkat Daerah
130.12	Instansi Vertikal
130.13	Kerjasama antar Provinsi/Daerah, dan Luar Negeri (Sister City)
131	Bupati/Walikota, meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya
132	Wakil Bupati/Walikota, meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya
133	Sekretaris Daerah, meliputi pencalonan, serah terima jabatan
134	Forum Koordinasi Pemerintah di Daerah, meliputi Muspida
135	Pembentukan Daerah
135.1	Pembentukan Daerah Otonom
135.2	Pembentukan Wilayah
135.3	Perubahan Batas Wilayah
135.4	Pemekaran Wilayah
135.5	Permasalahan Batas Wilayah
135.6	Pemindahan Ibukota Kabupaten/Kota
135.7	Pemberian dan penggantian nama kota, daerah, jalan
136	Pembagian Wilayah
137	Penyerahan Urusan
138	Pemerintahan Wilayah Kecamatan
138.1	Pembentukan Kecamatan
138.2	Pemekaran Kecamatan
138.3	Perluasan/perubahan batas wilayah Kecamatan
138.4	Pemindahan Ibu Kota Kecamatan
138.5	Laporan Kecamatan
<b>140</b>	<b>PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN</b>
141	Pamong Desa meliputi pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pelantikan, serah terima, penghasilan dsb
142	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan (APBDes/Kel)
143	Kekayaan Desa : bondo desa, tanah bengkok dll
144	Lembaga Tingkat Desa : Rembug Desa, Badan Permusyawaratan Desa, LKMD
145	Administrasi Desa/Kelurahan : Monografi, Peta Rupa Bumi dll
146	Kewilayahan
146.1	Pembentukan Desa/Kelurahan
146.2	Pemekaran Desa/Kelurahan
146.3	Perubahan dan Perluasan Batas Wilayah Desa/Kelurahan
146.4	Perubahan nama Desa/Kelurahan
146.5	Permasalahan Batas Desa/Kelurahan
146.6	Penyatuan Desa/Kelurahan

146.7	Penghapusan Desa/Kelurahan
147	RT-RW
<b>150</b>	<b>LEGISLATIF MPR/DPR/DPD</b>
151	Keanggotaan MPR
151.1	Pencalonan
151.2	Pengangkatan dan pengambilan Sumpah
151.3	Pemberhentian
151.31	Recall
151.32	Meninggal
151.4	Pelanggaran
151.5	Pergantian Antar Waktu
152	Keanggotaan DPR
152.1	Pencalonan
152.2	Pengangkatan dan pengambilan Sumpah
152.3	Pemberhentian
152.31	Recall
152.32	Meninggal
152.4	Pelanggaran
152.5	Pergantian Antar Waktu
153	Keanggotaan DPD
153.1	Pencalonan
153.2	Pengangkatan dan pengambilan Sumpah
154	Persidangan
155	Kesejahteraan
155.1	Keuangan
155.2	Penghargaan
156	Hak
157	Jawaban Pemerintah
158	Peninjauan/Kunjungan Lapangan
159	Kunjungan Kerja/Study Banding/Konsultasi
<b>160</b>	<b>DPRD PROVINSI</b>
161	Keanggotaan
161.1	Pencalonan
161.2	Pengangkatan dan pengambilan sumpah
161.3	Pelanggaran
161.4	Pemberhentian Antar Waktu
161.41	Meninggal Dunia
161.42	Mengundurkan Diri
161.43	Diberhentikan
161.5	Alat Kelengkapan Dewan
161.51	Pimpinan
161.52	Badan Musyawarah
161.53	Komisi
161.54	Badan Legislasi Daerah
161.55	Badan Anggaran
161.56	Badan Kehormatan
161.57	Alat Kelengkapan Lain (Pansus)
162	Persidangan
162.1	Rapat-Rapat
162.11	Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Istimewa
162.12	Rapat Pimpinan DPRD
162.13	Rapat Badan Musyawarah, Rapat Badan Anggaran, Rapat Badan Legislasi, Rapat Badan Kehormatan, Rapat Pansus
162.14	Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Konsultasi

162.15	Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, Rapat Pemandangan Umum
162.16	Rapat Fraksi
162.2	Fraksi
162.3	Tata Tertib
162.4	Kode Etik
162.5	Reses
162.6	Peninjauan/Kunjungan Lapangan
162.7	Kunjungan Kerja/Study Banding/Konsultasi
163	Kesejahteraan
163.1	Keuangan
163.2	Penghargaan
164	Hak
<b>170</b>	<b>DPRD KABUPATEN/KOTA</b>
171	Keanggotaan
171.1	Pencalonan
171.2	Pengangkatan dan pengambilan sumpah
171.3	Pelanggaran
171.4	Pemberhentian Antar Waktu
171.41	Meninggal Dunia
171.42	Mengundurkan Diri
171.43	Diberhentikan
171.5	Alat Kelengkapan Dewan
171.51	Pimpinan
171.52	Badan Musyawarah
171.53	Komisi
171.54	Badan Legislasi Daerah
171.55	Badan Anggaran
171.56	Badan Kehormatan
171.57	Alat Kelengkapan Lain (Pansus)
172	Persidangan
172.1	Rapat-Rapat
172.11	Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Istimewa
172.12	Rapat Pimpinan DPRD
172.13	Rapat Badan Musyawarah, Rapat Badan Anggaran, Rapat Badan Legislasi, Rapat Badan Kehormatan, Rapat Pansus
172.14	Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Konsultasi
172.15	Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, Rapat Pemandangan Umum
172.16	Rapat Fraksi
172.2	Fraksi
172.3	Tata Tertib
172.4	Kode Etik
172.5	Reses
172.6	Peninjauan/Kunjungan Lapangan
172.7	Kunjungan Kerja/Study Banding/Konsultasi
173	Kesejahteraan
173.1	Keuangan
173.2	Penghargaan
174	Hak
<b>180</b>	<b>HUKUM</b>
180.1	Konstitusi
180.11	Dasar Negara
180.12	Undang Undang Dasar

180.13	Undang Undang
180.14	Peraturan Pemerintah
180.15	Keppres/Perpres/Inpres
180.16	Kepmen/Permen/Inmen
180.17	Perundangan Tingkat Provinsi meliputi Perda, Kepgub/Pergub/Ingub
180.18	Perundangan Tingkat Kabupaten/Kota meliputi Perda, KepBup/KepWal, PerBup/PerWal
180.19	Perundangan Tingkat Desa meliputi Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa
180.2	Tap MPR
180.3	Konvensi
181	Perdata
181.1	Tanah
181.2	Rumah
181.3	Utang/Piutang
181.31	Gadai
181.32	Hipotik
181.4	Notariat
182	Pidana
182.1	Tindak Pidana Umum
182.2	Tindak Pidana Khusus
183	Peradilan
183.1	Jenis-jenis Peradilan
183.11	Peradilan Umum
183.111	Peradilan Negeri Tingkat Pertama
183.112	Peradilan Tinggi
183.113	Mahkamah Agung
183.12	Peradilan Agama Islam
183.121	Pengadilan Agama Islam Tingkat Pertama
183.122	Pengadilan Tinggi Agama Islam
183.123	Mahkamah Islam Agung
183.13	Peradilan Militer
183.131	Mahkamah Militer Tingkat Pertama
183.132	Mahkamah Militer Tinggi
183.133	Mahkamah Militer Agung
183.14	Peradilan Tata Usaha Negara
183.141	Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama
183.142	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
183.143	Mahkamah Tata Usaha Negara Agung
183.15	Peradilan Tindak Pidana Korupsi
183.16	Peradilan Hak Asasi Manusia
183.17	Mahkamah Konstitusi
183.18	Komisi Yudisial
183.19	Ombustmen
183.2	Upaya Hukum
183.21	Banding
183.22	Kasasi
183.23	Derden Verset
183.24	Peninjauan Kembali
183.25	Grasi, Amnesti, Abolisi
183.3	Eksekusi
183.4	Pembinaan hukum, meliputi Kadarkum
183.5	Bantuan Hukum, meliputi LBH

184	Hukum Internasional
185	Imigrasi
185.1	Visa
185.2	Paspor
185.3	Exit
185.4	Reentry
185.5	Lintas Batas/Batas Antar Negara
186	Kepenjaraan
186.1	Registrasi narapidana
186.2	Pembinaan narapidana
186.3	Pembebasan narapidana
186.4	Tahanan titipan
187	Kejaksaan
187.1	Penuntutan Umum
187.2	Penuntutan Khusus
188	Hukum Adat
<b>190</b>	<b>HUBUNGAN LUAR NEGERI</b>
191	Perwakilan Asing
192	Tamu Negara
193	Kerjasama Diplomatik dengan Negara Asing
194	Perwakilan RI di Luar Negeri
195	PBB
196	Laporan Luar Negeri
<b>200</b>	<b>POLITIK</b>
201	Perencanaan dan Program Pembinaan Politik Luar Negeri
201.1	Pembinaan dan Pemahaman Ideologi Negara
201.2	Kesatuan Bangsa
201.3	Pelaksanaan Pembinaan Politik Dalam Negeri termasuk laporannya
201.4	Keadaan Politik Luar Negeri
201.5	Evaluasi dan Pengawasan Pembinaan ipoleksosbud hankam
201.6	Orde Baru
201.7	Orde Reformasi
<b>210</b>	<b>KEPARTAIAN</b>
211	Partai Politik
211.1	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PARPOL
211.2	Program Kerja, data kegiatan PARPOL
211.3	Pembinaan PARPOL
211.4	Hasil Munas/Musda PARPOL
211.5	Struktur/Kepengurusan, pengkaderan dan Keanggotaan PARPOL
211.6	Data inventaris dan keuangan PARPOL
212	Partai/Organisasi Terlarang
212.1	Keputusan pembubaran partai/organisasi terlarang
212.2	Daftar dan data pengurus anggota partai/organisasi terlarang
212.3	Ijin Meninggalkan tempat/domisili bagi anggota partai/organisasi terlarang
212.4	Daftar berkala mengenai keadaan anggota partai/organisasi terlarang
212.5	Laporan umum mengenai keadaan anggota partai/organisasi terlarang
<b>220</b>	<b>ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>
221	Pembentukan organisasi
221.1	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
221.2	Kepengurusan dan daftar anggota organisasi
221.3	Program Kerja organisasi



221.4	Munas/Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota
222	Pembinaan organisasi
222.1	Kegiatan organisasi dan pelaporannya
222.2	Daftar inventaris kekayaan organisasi
<b>230</b>	<b>ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL</b>
231	Pembentukan organisasi
231.1	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
231.2	Kepengurusan dan daftar anggota organisasi
231.3	Program kerja organisasi
231.4	Munas/Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota
232	Pembinaan organisasi
232.1	Kegiatan organisasi dan pelaporannya
232.2	Daftar inventaris kekayaan organisasi
<b>240</b>	<b>ORGANISASI PEMUDA</b>
241	Pembentukan organisasi
241.1	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
241.2	Kepengurusan dan daftar anggota organisasi
241.3	Program kerja organisasi
241.4	Munas/Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota
242	Pembinaan organisasi
242.1	Kegiatan organisasi dan pelaporannya
242.2	Daftar inventaris kekayaan organisasi
<b>250</b>	<b>ORGANISASI BURUH, TANI DAN NELAYAN</b>
251	Pembentukan organisasi
251.1	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
251.2	Kepengurusan dan daftar anggota organisasi
251.3	Program kerja organisasi
251.4	Munas/Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota
252	Pembinaan organisasi
252.1	Kegiatan organisasi dan pelaporannya
252.2	Daftar inventaris kekayaan organisasi
<b>260</b>	<b>ORGANISASI WANITA</b>
261	Pembentukan organisasi
261.1	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
261.2	Kepengurusan dan daftar anggota organisasi
261.3	Program kerja organisasi
261.4	Munas/Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota
262	Pembinaan organisasi
262.1	Kegiatan organisasi dan pelaporannya
262.2	Daftar inventaris kekayaan organisasi
<b>270</b>	<b>PEMILU (PEMILIHAN UMUM), PILKADA (PEMILIHAN KEPALA DAERAH)</b>
271	Pencalonan
272	Nomor Urut/Tanda Gambar
273	Kampanye
273.1	Dana Kampanye
274	Petugas Pemilu
275	Pemilih/Daftar Pemilih
276	Sarana
276.1	TPS
276.2	Kendaraan
276.3	Surat Suara
276.4	Kotak Suara
277	Pemungutan Suara/Penghitungan Suara

278	Hasil Pemilu
278.1	Penetapan terpilih dan pembagian kursi anggota legislatif
278.2	Penetapan pemenang pilkada
279	KPU/KPUD
<b>280</b>	<b>PENGAWASAN PEMILU/PILKADA</b>
281	Pemantauan
282	Pelanggaran
283	Sengketa
284	Panwaslu
<b>300</b>	<b>KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>
300.1	Kebijakan Pemerintah mengenai situasi dan kondisi keamanan
300.2	Pembinaan dan pengaturan mengenai larangan
300.3	Pencegahan dan penanggulangan gangguan/ancaman keamanan/ketertiban umum
300.4	Program kerja serta tata cara penanggulangan keamanan
301	Koordinasi dan Kerjasama keamanan dan ketertiban umum (Trantibum)
302	Pengawasan Trantibum
303	Penegakan Pelaksanaan Perda
304	Pembinaan/Penyuluhan pelanggaran Perda
305	Patroli Wilayah
306	Laporan kunjungan VIP, VVIP, Tamu Asing
306.1	Pengamanan
306.2	Pengawalan
307	Pemberitahuan keadaan bahaya dan jam malam meliputi pemberitahuan, ketentuan pelaksanaan dan pengawasan
<b>310</b>	<b>PERTAHANAN</b>
311	Darat
312	Laut
313	Udara
314	Ketahanan Bangsa
315	Ketahanan Ekonomi
316	Ketahanan Seni dan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan
<b>320</b>	<b>KEMILITERAN/TNI</b>
321	Latihan Militer
322	Wajib Militer
323	Operasi Militer
324	Kekaryaannya TNI
325	Kemanunggalan TNI dengan rakyat
<b>330</b>	<b>KEAMANAN</b>
331	Kepolisian
331.1	Polisi Pamong Praja
332	Huru-hara/Demonstrasi
333	Senjata Api/Tajam
334	Bahan Peledak
335	Perjudian
336	Surat-surat kaleng
337	Pengaduan Masyarakat
338	Himbauan atau Larangan
<b>340</b>	<b>PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)</b>
340.1	Kebijaksanaan Pemerintah mengenai pembentukan Linmas
341	Pembinaan dan Diklat
341.1	Pengangkatan/pemberhentian anggota Linmas
341.2	Pendidikan/latihan Linmas

341.3	Pelatihan PAM Swakarsa
341.4	Pendidikan/latihan MENWA
342	Pengerahan dan pengendalian Linmas
343	Kesejahteraan bagi anggota Linmas
343.1	Pemberian Tali Asih bagi anggota Linmas
343.2	Bantuan Modal Usaha bagi anggota Linmas
343.3	Santunan uang duka bagi anggota Linmas
343.4	Penghargaan bagi anggota Linmas
344	Data Linmas, MENWA, PAM Swakarsa
344.1	Linmas Lanjut Usia
345	Orientasi Kesadaran Bela Negara
346	Kegiatan Pelaksanaan Linmas
<b>350</b>	<b>KEJAHATAN</b>
351	Makar/Pemberontakan/Terrorisme
352	Pembunuhan
353	Penganiayaan/Pencurian/Perampasan
354	Subversi/Penyeludupan/Narkotika
355	Penipuan dan Pemalsuan
356	Korupsi/penyelewengan/penyalahgunaan jabatan
357	Kekerasan pada perempuan dan anak
357.1	Pelaporan
357.2	Penanganan korban
358	Kenakalan
359	Kejahatan lainnya (trafficking, hipnotis, dll)
<b>360</b>	<b>BENCANA</b>
360.1	Pelatihan
360.2	Surat Keputusan
360.3	Berita Acara
361	Gunung Merapi/Gempa/Tsunami
362	Banjir/Tanah Longsor
363	Angin Topan
364	Kebakaran
364.1	Pemadam Kebakaran
365	Kekeringan
366	Posko Bencana
367	Koordinasi/Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana
368	MOU Pemerintah Pusat BNPB
<b>370</b>	<b>KECELAKAAN</b>
371	Latihan SAR
372	Latihan ketrampilan penyelamatan di air dan menyelam
373	Pelatihan manajemen bagi pejabat
374	Satkorlak dan Satlak PBP
375	Pelatihan kemampuan Pusdalop bagi aparat PBP
376	Latihan ketrampilan pemadam kebakaran
377	Kecelakaan Darat, Laut, Udara
378	Investigasi/penyelidikan kecelakaan
379	Asuransi Kecelakaan
<b>380</b>	<b>PENDAMPINGAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI</b>
381	Perencanaan
381.1	Perencanaan teknis
381.2	Rekomendasi
382	Bantuan Bencana
383	Penanggulangan Bencana dengan pihak lain
384	Sarana prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi

385	PUSDALOPS
386	Kunjungan lapangan
387	Relawan
388	Laporan Bencana
<b>390</b>	<b>KERJASAMA BPBD DENGAN INSTANSI LAIN</b>
391	Instansi pemerintah Pusat
392	Instansi pemerintah di daerah
393	Lembaga International
394	Lembaga non pemerintah nasional
<b>400</b>	<b>KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>
401	Kebijakan dan Program Pemerintah untuk kesejahteraan rakyat
<b>410</b>	<b>PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN</b>
411	Gotong-royong
411.1	Swadaya gotong royong
411.11	Pembinaan
411.12	Pungutan
411.2	Lembaga Sosial Desa (LSD)
411.3	Latihan kerja masyarakat
411.4	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
411.5	Penyuluhan Masyarakat Desa
411.6	Kelembagaan Desa
411.7	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
412	Perekonomian Desa
412.1	Produksi Desa
412.11	Pengolahan
412.12	Pemasaran
412.2	Pembiayaan Pembangunan Desa
412.21	Inventarisasi Data
412.22	Petunjuk/Pembinaan Pelaksanaan
412.23	Pelaksanaan dan Perkembangan Pembangunan
412.24	Bantuan/Stimulasi
412.25	Perkreditan Desa
412.26	Pelaporan
412.27	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP)
412.3	Koperasi Desa
412.31	Badan Usaha Unit Desa (BUUD)
412.32	Koperasi Unit Desa (KUD)
413	Sarana dan Prasarana Desa
413.1	Pemukiman kembali penduduk
413.2	Pemugaran perumahan dan lingkungan Desa
413.3	Perbaikan Kampung
413.4	Teknologi Tepat Guna (TTG)
414	Pengembangan Desa
414.1	Perlombaan Desa dan Kelurahan
414.11	Pedoman
414.12	Penilaian
414.13	Kejuaraan
415	Koordinasi
415.1	Kerjasama
414.11	Luar Negeri
415.12	Perguruan tinggi
415.13	Kementerian/Lembaga Pemerintah
415.14	Lembaga lainnya

<b>420</b>	<b>PENDIDIKAN</b>
420.1	Kebijakan dan Program Pemerintah untuk pendidikan
420.2	Pendidikan Karakter bangsa, wawasan kebangsaan, jiwa nasionalisme dsb
420.3	Pendidikan Kemasyarakatan
421	Sekolah (termasuk akreditasi)
421.1	Pra sekolah (PAUD, Playgroup)
421.2	Sekolah Dasar
421.3	Sekolah Menengah
421.4	Sekolah Kejuruan
421.5	Perguruan Tinggi (Sekolah Tinggi, Akademi, Universitas, dll)
421.6	Kegiatan sekolah meliputi Dies Natalis, Lustrum
421.7	Kegiatan pelajar diantaranya reuni, darmawisata,widyawisata, lomba-lomba ( LKS, olimpiade sains, olimpiade olah raga dan sains), Pelajar teladan, Pertukaran Pelajar
421.8	Sekolah Pendidikan Luar Biasa
421.9	Pendidikan Luar Sekolah/Pemberantasan Buta Huruf
422	Administrasi Sekolah
422.1	Persyaratan masuk sekolah, testing, ujian, OSPEK
422.2	Tahun Pelajaran
422.3	Hari Libur
422.4	Uang Sekolah, diantaranya SPP, SPI
422.5	Bea Siswa dan Penghargaan siswa berprestasi
422.6	Ijazah, Sertifikat
422.7	Bantuan Pendidikan : Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Khusus Murid (BKM), Bantuan Siswa Miskin (BSM)
423	Metode Belajar
423.1	Kuliah
423.2	Ceramah, Simposium, Seminar
423.3	Diskusi
423.4	Kuliah Lapangan, KKN, Magang/Praktek/PKL
423.5	Kurikulum
423.6	Karya Tulis, Karya Ilmiah
423.7	Ujian
424	Tenaga Pengajar (Guru, Dosen, guru/dosen teladan, guru/dosen berprestasi)
424.1	Pertukaran Guru ke Luar Negeri
424.2	Sertifikasi Guru
425	Sarana Pendidikan
425.1	Bangunan Pendidikan
425.11	Gedung Sekolah
425.12	Kampus
425.13	Pusat Kegiatan
425.14	Perpustakaan
425.15	Laboratorium
425.2	Buku
425.3	Perlengkapan Pendidikan
425.4	Sistem Informasi pendidikan
425.5	Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan
<b>426</b>	<b>KEOLAHRAGAAN</b>
426.1	Pembinaan Keolahragaan
426.11	Olah Raga Prestasi (PON, Sea Games, Kejurnas, Olympiade)
426.12	Olah Raga Pendidikan (POPDA SD, Porseni dll)
426.13	Olah Raga Rekreasi /Massal (Senam, sepeda santai, olah raga

	tradisional)
426.14	Iptek dan Industri Olah Raga
426.15	Sarana Prasarana Keolahragaan
426.2	Kemitraan Olah Raga
<b>427</b>	<b>KEPEMUDAAN</b>
427.1	Pertukaran Pemuda
427.2	Paskibraka
427.3	Sarana Prasarana Kepemudaan, meliputi sarana kegiatan remaja : gelanggang remaja
427.4	Kemitraan Pemuda
427.5	Karang Taruna
428	Kepramukaan/ Kependuan
<b>430</b>	<b>KEBUDAYAAN</b>
430.1	Kebijakan dan Program Pemerintah untuk kebudayaan
430.2	Pembinaan bidang kebudayaan
431	Kesenian
431.1	Cabang Kesenian (Seni pewayangan, seni tari, seni musik, seni rupa, seni lukis dll)
431.2	Sarana
431.21	Gedung Kesenian
431.22	Padepokan
431.23	Lembaga Adat
431.24	Kegiatan adat/tradisi
431.3	Usaha pertunjukan,hiburan, kesenangan : festival, pentas seni
432	Kepurbakalan
432.1	Museum
432.2	Peninggalan Kuno
432.21	Candi, termasuk pemugaran
432.22	Benda
433	Sejarah
434	Bahasa
435	Penghayat Kepercayaan
<b>440</b>	<b>KESEHATAN</b>
440.1	Kebijakan dan Program Pemerintah untuk kesehatan
441	Pembinaan Kesehatan
441.1	Gigi
441.2	Mata
441.3	Jiwa
441.4	Kanker
441.5	UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)
441.6	Perawatan
441.7	Kesehatan masyarakat meliputi PKM, Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat melalui media PKK, Posyandu,dsb
441.8	Kesehatan Ibu dan Anak
441.9	JPSBK (Jaminan Pengaman Sosial Bidang Kesehatan)
441.91	JAMKESMAS
441.92	JAMKESDA
441.93	JAMPERSAL
441.94	Jaminan lainnya
442	Obat-obatan
442.1	Pengadaan
442.2	Pemeriksaan obat
442.3	Penyimpanan obat
442.4	Distribusi obat

442.5	Pengawasan obat
442.51	Obat Generik
442.52	Obat Terlarang
442.53	Pemalsuan obat
443	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit
443.1	Pencegahan Penyakit
443.2	Pemberantasan Penyakit Menular Langsung (P.2.M.L)
443.21	Kusta
443.22	Kelamin, HIV, AIDS, IMS
443.23	Frambusia
443.24	T.B.C
443.25	Kholera
443.26	SARS, dan jenis penyakit lainnya
443.3	Pemberantasan Penyakit Menular Sumber Binatang (P2B)
443.31	Malaria
443.32	Dengue Haemorrhagic Fever (DHF), DBD
443.33	Filaria
443.34	Serangga
443.35	Rabies
443.36	Antrak
443.37	Leptosirosis
443.38	Chikungunya
443.39	Penyakit lainnya
443.4	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular
443.41	A. Pektoris
443.42	IMA (Irama Mastcmik Akut)
443.43	Hipertensi
443.44	Stroke
443.45	Diabetes Melitus
443.46	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit CA. Serviks
443.47	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit CA. Mammae
443.48	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit CA. Hepar
443.49	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit CA Paru, dan penyakit lainnya
443.5	Epidemiology dan Karantina (Epidka)
443.51	Imunisasi
443.52	Surveilanse
443.53	Pestisida
443.54	Pencemaran udara
443.55	Jamban Keluarga
443.56	Kesehatan Institusi
443.6	Higiene sanitasi
443.61	Tempat-tempat pembuatan dan penjualan makanan minuman (TPPMM), jasa boga
443.62	Sarana air minum
443.63	Pestisida, insektisida
443.64	Pencemaran
443.65	Jamban keluarga, sanitasi rumah tangga
443.66	Kesehatan institusi, misal : Poskestren, sanitasi masjid dll
443.67	Higiene sanitasi CA. Mammae
443.68	Higiene sanitasi CA. Hepar
443.69	Higiene sanitasi CA. Paru
443.7	Kejadian Khusus
443.71	Dekopensatiokordosis (serangan jantung)

443.72	Asma
443.73	Psikosis
443.74	PPOM
443.75	Kecelakaan Lalu Lintas
443.76	Kejadian Luar Biasa (KLB)
444	Gizi dan Pengawasan Makanan
444.1	Kekurangan Makanan
444.2	Bahaya kelaparan, busung lapar, gizi busuk
444.3	Keracunan makanan
444.4	Menu makanan rakyat
444.5	Gondok endemik (GAKI)
445	RSU, RSJ, RS Khusus
445.1	Pelayanan Medis (termasuk surat keterangan berkaitan dengan kondisi pasien, visum)
445.11	Rawat Inap
445.12	Rawat Jalan
445.13	IGD
445.14	IBS
445.15	ICU
445.16	MCU (Medical Check Up)
445.2	Penunjang Medis
445.21	Farmasi
445.22	Rekam Medik
445.23	Radiologi
445.24	Gizi
445.25	Laboratorium Klinik
445.26	Laboratorium Patologi Anatomi, Forensik
445.27	Bank Darah Rumah Sakit
445.28	Sanitasi Rumah Sakit
445.29	CSSD/Laundry
445.3	Keperawatan
445.4	Komite Medik
445.5	SPI (Satuan Pengawas Internal)
445.6	Mutu Rumah Sakit
445.61	Akreditasi
445.62	ISO
445.63	PSBH (Problem Solving for Better Hospital)
445.64	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
445.7	IPAL (Instalasi Pengolahan Limbah)
445.8	Promosi layanan kesehatan
445.9	Kasus Hukum Rumah Sakit
446	Tenaga Medis
446.1	Perencanaan Tenaga Medis
446.2	Pendayagunaan Tenaga Medis
446.21	Perijinan untuk Tenaga Medis
446.22	Kegiatan Bhakti Sosial Tenaga Medis
446.23	TKHI (Tenaga Kesehatan Haji Indonesia)
446.3	Diklat Tenaga Kesehatan/Medis
446.4	Diklat Tenaga Kesehatan/Para Medis
446.5	Pendidikan di bidang Kesehatan termasuk pendidikan spesialis
447	Peralatan Kesehatan
447.1	Standarisasi
447.2	Penyimpanan
447.3	Distribusi



447.4	Perijinan berkaitan dengan Alat Kesehatan
448	Pengobatan Alternatif
448.1	Pijat
448.2	Akupunktur
448.3	Jamu dan herbal
448.4	Dukun
449	Lembaga penyedia layanan kesehatan
449.1	PUSKESMAS dan PUSKESMAS Keliling
449.2	Poliklinik dan Balai Kesehatan
449.3	Rumah Bersalin
449.4	Posyandu
449.5	Laboratorium Kesehatan
449.6	Apotik
449.7	Sanatorium Kesehatan
<b>450</b>	<b>AGAMA</b>
450.1	Kebijakan dan program pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan bidang keagamaan
450.2	Bantuan dibidang keagamaan
451	Islam
451.1	Peribadatan
451.11	Sholat
451.12	Zakat, Infaq, Shodaqoh
451.13	Puasa
451.14	Umroh dan Haji
451.2	Rumah Ibadah (Masjid, Musholla, Surau)
451.3	Tokoh Agama
451.4	Pendidikan Agama
451.41	Pendidikan Tinggi Agama
451.42	Menengah, MTs, MA
451.43	Dasar, Pra Sekolah, MI
451.44	Lembaga pendidikan Non Formal ( TPQ/Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren dll)
451.45	Sarana pendidikan meliputi buku, gedung sekolah dll
451.46	Tenaga Pengajar
451.47	Dakwah (Pengajian, MTQ)
451.5	Wakaf
451.6	Mazhab Agama Islam
451.7	Organisasi keagamaan bukan politik (Majelis Ulama Indonesia, Dewan Hisab Rukyat dll)
451.8	Tokoh Agama, Rohaniawan (Da'i)
452	Kristen Protestan
452.1	Peribadatan
452.2	Rumah Ibadah Gereja dll
452.3	Tokoh Agama, Rohaniawan (Pendeta, Domine dll)
452.4	Mazhab Agama Kristen Protestan
452.5	Organisasi Gerejani
453	Khatolik
453.1	Peribadatan
453.2	Rumah Ibadah Gereja dll
453.3	Tokoh Agama, Rohaniawan
453.4	Mazhab Agama Khatplik
453.5	Organisasi Gerejani
454	Hindu
454.1	Peribadatan

454.2	Rumah Ibadah Pura dll
454.3	Tokoh Agama, Rohaniawan
454.4	Mazhab Agama Hindu
454.5	Organisasi Agama Hindu
455	Budha
455.1	Peribadatan
455.2	Rumah Ibadah Candi, Vihara dll
455.3	Tokoh Agama, Rohaniawan
455.4	Mazhab Agama Budha
455.5	Organisasi Agama Budha
456	Kong Hu Cu
456.1	Peribadatan
456.2	Rumah Ibadah Klenteng dll
456.3	Tokoh Agama, Rohaniawan
456.4	Mazhab Agama Kong Hu Cu
456.5	Organisasi Agama Kong Hu Cu
<b>460</b>	<b>SOSIAL</b>
461	Rehabilitasi Penyandang Cacat
461.1	Cacat Ganda
461.2	Cacat Fisik
461.3	Cacat Mental
462	Rehabilitasi Sosial
462.1	Gelandangan/orang terlantar, anak jalanan
462.2	Pengemis
462.3	Tuna Susila
462.4	Anak Nakal
462.5	Tuna Wisma
463	Kesejahteraan anak dan keluarga
463.1	Kesejahteraan Anak
463.11	Pengarusutamaan Hak-hak Anak (PUHA)
463.12	Perlindungan Anak
463.13	Anak asuh
463.2	Kualitas Hidup Perempuan
463.21	Perlindungan Perempuan
463.22	Ibu teladan
463.23	Pengarusutamaan Gender (PUG)
464	Keperintisan dan Kepahlawanan
464.1	Pahlawan meliputi Penghargaan kepada pahlawan, tunjangan kepada pahlawan dan jandanya.
464.2	Perintis Kemerdekaan meliputi Pembinaan, penghargaan dan tunjangan kepada Perintis Kemerdekaan.
464.3	Cacat Veteran
465	Kesejahteraan Sosial
465.1	Lanjut usia
465.2	Korban kekacauan, pengungsian, rehabilitasi
465.3	Masyarakat miskin : Raskin, BLT dll
466	Sumbangan Sosial
466.1	Korban Bencana
466.11	Jaminan Sosial
466.2	Pencarian dana untuk sumbangan : penyelenggaraan undian, ketangkasan, bazar dsb
466.3	Panti Asuhan
467	Bimbingan Sosial
467.1	Masyarakat suku terasing meliputi : bimbingan pendidikan,

	kesehatan, pemukiman, Pembinaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) dan sebagainya
468	PMI
469	Makam
469.1	Umum
469.2	Pahlawan
469.3	Khusus, Keluarga, Raja
469.4	Krematorium
<b>470</b>	<b>KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</b>
470.1	Kebijakan dan Program Pemerintah untuk kependudukan
471	Pendaftaran Penduduk
471.1	Identitas Penduduk
471.11	Biodata
471.12	Nomor Induk Kependudukan
471.13	Kartu Tanda Penduduk
471.14	Kartu Keluarga
471.15	Advokasi Identitas Penduduk
471.2	Perpindahan penduduk dalam wilayah Indonesia
471.21	Perpindahan penduduk WNI
471.22	Perpindahan penduduk WNA dalam wilayah Indonesia
471.23	Perpindahan Penduduk WNA dan WNI tinggal sementara
471.24	Daerah Terbelakang
471.25	Bedol Desa
471.3	Perpindahan Penduduk antar Negara
471.31	Penduduk Indonesia ke Luar Negeri
471.32	Orang asing tinggal sementara
471.33	Orang asing tinggal tetap
471.34	Perpindahan penduduk antar negara di wilayah perbatasan antar negara (pelintas batas tradisional)
471.4	Pendaftaran pengungsi dan penduduk rentan
471.41	Akibat bencana alam
471.42	Akibat kerusakan sosial
471.43	Pendaftaran penduduk daerah terbelakang
471.44	Pendaftaran penduduk rentan
472	Pencatatan sipil
472.1	Kelahiran kematian dan advokasi
472.11	Kelahiran
472.12	Kematian
472.13	Advokasi
472.2	Perkawinan, perceraian dan advokasi
472.21	Perkawinan agama Islam
472.22	Perkawinan agama non Islam
472.23	Perceraian agama Islam
472.24	Perceraian agama non Islam
472.25	Advokasi
472.3	Pengangkatan pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta dan advokasi
472.31	Pengangkatan anak
472.32	Pengakuan anak
472.33	Pengesahan anak
472.34	Perubahan akta
472.35	Pembatalan akta
472.36	Advokasi
472.4	Pencatatan Kewarganegaraan

472.41	Akibat perkawinan
472.42	Akibat kelahiran
472.43	Non Perkawinan/Non Kelahiran
472.44	Naturalisasi
472.45	Perubahan WNI ke WNA
473	Informasi Kependudukan
473.1	Teknologi Informasi
473.2	Pengolahan Data Kependudukan
473.21	Pendaftaran penduduk
473.22	Kejadian vital penduduk
473.23	Penduduk non registrasi
473.3	Pelayanan informasi kependudukan
474	Perkembangan penduduk
474.1	Pengarahan Kuantitas Penduduk
474.11	Struktur Jumlah
474.12	Komposisi
474.13	Fertilitas
474.14	Kesehatan Reproduksi
474.15	Morbiditas Penduduk
474.16	Mortalitas Penduduk
474.2	Pengembangan Kuantitas Penduduk
474.21	Anak dan remaja
474.22	Penduduk usia produktif
474.23	Penduduk lanjut usia
474.24	Gender
474.3	Penataan Persebaran Penduduk
474.31	Migrasi antar wilayah
474.32	Urbanisasi
474.4	Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk
474.5	Pengembangan Wawasan Kependudukan
<b>475</b>	<b>TRANSMIGRASI</b>
475.1	Penyiapan informasi daerah transmigrasi
475.11	Informasi potensi peluang bekerja dan berusaha di daerah transmigrasi
475.12	Perbandingan potensi daerah asal dan daerah transmigrasi
475.13	Permasyarakatan/sosialisasi transmigrasi
475.14	Peran serta lembaga dan instansi terkait serta media massa dalam penyampaian informasi transmigrasi
475.15	Publikasi transmigrasi melalui pameran dan kesenian
475.16	Bimbingan dan penyuluhan transmigrasi bagi masyarakat daerah asal dan daerah transmigrasi
475.17	Kerjasama di bidang transmigrasi
475.18	Kepulangan transmigran karena daerah terjadi konflik
475.2	Pemukiman transmigrasi
475.21	Penggunaan tanah pemukiman transmigrasi
475.22	Pengembangan, struktur wilayah dan analisis data wilayah transmigrasi
475.23	Tata ruang satuan kawasan pengembangan, study kelayakan dan dampak lingkungan transmigrasi
475.24	Teknis ruang satuan pemukiman dan lokasi /peta informasi pemukiman
475.25	Standarisasi dan spesifikasi teknis rumah transmigran, fasilitas umum /social dan jaringan transportasi
475.26	Tanah pemukiman, pengadaan areal tanah dan pembebasannya, identifikasi, pengukuran dan pembuatan batas areal tanah

475.27	Penyelesaian masalah tanah di lokasi pemukiman transmigrasi
475.28	Tata ruang pemukiman transmigrasi
475.281	Rancangan dan pemanfaatan areal tanah
475.282	Rancangan kapling TSM
475.283	Pengukuran dan pembagian lahan pekarangan, lahan usaha dan fasilitas umum
475.284	Penyelesaian kekurangan lahan usaha kepada transmigran dan sengketa tanah
475.285	Inventarisasi penataan kembali dan penggunaan areal tanah
475.286	Pengukuran batas unit pemukiman
475.287	Penyelesaian perubahan areal dan urusan perijinan pemanfaatan areal tanah
475.29	Sarana pemukiman transmigrasi
475.291	Pembinaan dan pengadalan, penyiapan bangunan rumah transmigran dan jamban keluarga dan fasilitas umum
475.292	Pembinaan dan pengendalian penyiapan sarana air bersih
475.293	Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan sumber energi
475.294	Pembinaan dan pengendalian peningkatan sarana
475.295	Pembinaan, pengendalian dan teknis peningkatan potensi lahan dan lingkungan
475.3	Pengerahan, pemindahan dan penempatan
475.31	Pengkajian dan pengembangan metode pengerahan dan penempatan
475.32	Teknis penyuluhan dan motivasi dalam pengerahan dan penempatan
475.33	Pengerahan
475.331	Pendaftaran dan seleksi calon transmigran
475.332	Berkas persyaratan dan administrasi calon transmigran
475.333	Transmigran yang dinyatakan lulus penyaringan
475.34	Pemberangkatan transmigran
475.341	Pengangkutan transmigran melalui laut, udara, dan darat
475.342	Jadwal dan tempat pelaksanaan pemberangkatan
475.343	Pelaksanaan pengurusan pemberangkatan
475.344	Pengawasan perjalanan transmigran
475.345	Pengaturan rute pemberangkatan
475.346	Alokasi penempatan dan surat perintah pemberangkatan
475.35	Penempatan Transmigran
475.351	Kesiapan lokasi dan daya tampung
475.352	Pendataan transmigran di lokasi yang masih dibina
475.353	Data transmigran yang meninggalkan lokasi di setiap UPT
475.354	Pemantauan penempatan transmigrasi pengganti
475.4	Penampungan transmigrasi (transito), dan pelatihan transmigran
475.41	Pelatihan transmigran
475.411	Program pengajaran dan metode pelatihan
475.412	Penyusunan silabus dan modul pelatihan
475.413	Penyusunan calon peserta/pelatih
475.42	Penampungan transmigran di transito
475.421	Pelayanan kesehatan bagi transmigran
475.422	Pelayanan makanan bagi transmigran
475.423	Pelayanan pembekalan/peralatan bagi transmigran
475.5	Pembinaan masyarakat transmigrasi
475.51	Identifikasi dan penjajagan pembinaan
475.511	Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap penyesuaian

475.512	Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap pengembangan
475.513	Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap pembinaan
475.52	Pembinaan Pendidikan
475.521	Penyediaan/penyiapan sarana dan usaha pengembangan pendidikan
475.522	Pelaksanaan penyiapan tenaga pendidikan dan status
475.53	Pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat
475.54	Pembinaan kesehatan
475.541	Penyediaan sarana kesehatan dan KB
475.542	Penanggulangan penyakit dan kejadian luar biasa
475.543	Pendistribusian bantuan pangan
475.55	Pembinaan rokhani
475.551	Bimbingan mental spiritual dan penyediaan petugas agama
475.552	Bimbingan adaptasi masyarakat
475.553	Bimbingan pelaksanaan penumbuhan interaksi sosial
475.56	Pelayanan pos di daerah transmigrasi
475.57	Penyerahan UPT yang layak untuk di serahkan
475.58	Penilaian transmigran teladan
475.59	Pemantauan dan penilaian kelayakan usaha
<b>476</b>	<b>KELUARGA BERENCANA</b>
476.1	Alat Kontrasepsi
476.2	Pelayanan KB meliputi KB Lestari, KB Mandiri
476.3	Penyuluh Lapangan KB (PLKB)
476.4	Pos KB desa
476.5	Akseptor KB
<b>480</b>	<b>MEDIA MASSA</b>
480.1	Kebijakan dan Program Pemerintah dalam bidang media massa
481	Media Cetak meliputi perijinan hingga pencabutan ijin bila terjadi pelanggaran
481.1	Surat Kabar
481.2	Majalah
481.3	Buletin
481.4	Jurnal
481.5	Press Release, Klarifikasi Berita, Press Statistik
481.51	Perindustrian Perdagangan termasuk 9 harga pokok
481.52	Perekonomian dan Perbankan
481.53	Bidang lainnya
481.6	Layanan Informasi/Leaflet
481.7	Masukan Analisis Gubernur
482	Media Elektronik meliputi perijinan hingga pencabutan ijin bila terjadi pelanggaran
482.1	Radio
482.2	Televisi
482.3	Film Dokumenter
482.4	Pengawasan Lembaga Penyiaran
482.5	Kelompok Pemantau Isi Siaran
482.6	Pengkajian Isi Siaran
482.7	SDM Penyiaran
483	Periklanan
483.1	Ketentuan Pemasangan reklame
483.2	Pameran
484	Kewartawanan/Jurnalistik

484.1	Pembentukan Organisasi Profesi
484.2	Kasus-kasus kewartawanan
484.3	Penyalahgunaan Profesi
484.4	Bantuan kepada/dari organisasi Profesi Wartawan
484.5	Musyawahar Wartawan Indonesia
484.6	Pendidikan Jurnalistik khusus wartawan
484.7	Temu Pers/Konferensi Pers
484.8	Pers Tour
484.9	Kunjungan Wartawan Asing
485	Penyuluhan Masyarakat
485.1	Publikasi
485.2	Pendirian information center
486	Pembinaan bidang Infokom
486.1	Training Fotografi
486.2	Training Berita Jurnalistik
486.3	Bintek Infokom
486.4	Rakorda Infokom
486.5	Rakor Pengendalian Kegiatan
486.6	Pengelolaan website Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
487	Hubungan Antar Lembaga
487.1	Non Pemerintah
487.11	Wahana Komunikasi Masyarakat
487.12	Lembaga Komunikasi Masyarakat
487.2	Lembaga Pemerintah
487.21	Pertemuan Bakohumas dan Kehumasan
487.22	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID)
487.3	Luar negeri
487.31	Promosi luar negeri
487.32	Kunjungan Wartawan asing
488	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Informasi
489	Sistem Naskah Sosialisasi Kegiatan Gubernur
489.1	Himpunan Naskah Sambutan, Himpunan Paparan, Himpunan Keynote Speaker, Himpunan Rubrik dan Himpunan Dialog Interaktif
489.2	Dialog Interaktif
489.3	Rubrik
489.4	Materi /pointers Sambutan, Paparan, Naskah Keynote Speaker, Rubrik dan Dialog Interaktif
489.5	Pembuatan Kolom Khusus Hasil-Hasil Pembangunan

<b>500</b>	<b>PEREKONOMIAN</b>
500.1	Dewan stabilisasi
501	Pengadaan Pangan
502	Pengadaan Sandang
503	Perizinan pada umumnya. Untuk perizinan sesuai Bidang, klasifikasi pada masalahnya
<b>510</b>	<b>PERDAGANGAN</b>
510.1	Promosi perdagangan
510.11	Pekan raya
510.12	Iklan
510.13	Pameran
510.14	Event-event
510.15	Lomba-lomba (lomba desain, busana, kerajinan)
510.2	Pelelangan, distribusi
510.21	Pemasaran Sembako

510.22	Pemasaran hasil industri
510.23	Penentuan harga pokok
510.3	Bina Usaha dan Sarana Perdagangan
510.31	Rencana dan Program kerja
510.32	Pelaksanaan Pelayanan Administrasi
510.33	Pelaksanaan Teknis
510.34	Pemantauan
510.35	Evaluasi dan Pelaporan
510.4	Perijinan (HO, Gangguan, Reklame, dll)
510.41	Penerbitan SIUP
510.42	Perpanjangan
510.43	Ijin prinsip
510.44	Rekomendasi
510.5	Perdagangan antar Pulau
510.51	Kerjasama bahan baku
510.52	Industri pemasaran
510.53	Kontrak
510.6	T e r a
510.61	Tera dan Tera Ulang
510.62	Takaran
510.63	Timbangan dan anak timbangan
510.64	Kalibrasi
510.65	Cap tanda tera
510.66	Biaya tera
510.7	Bantuan peralatan
510.71	Proposal
510.72	Surat perjanjian / kontrak
510.73	Serah terima
510.8	Perijinan/Rekomendasi Tanda Pabrik
510.9	Kemetrologian
510.91	Standart Tingkat Tiga
510.92	Standart Kerja Satuan Ukuran
510.93	Ukuran Metrologi
510.931	Peralatan
510.932	Laboratorium Metrologi Legal
510.933	Tanki Ukur Mobil
510.934	Meter Taxi
510.935	KWH Meter termasuk didalamnya listrik dan PDAM
510.936	S P B U
511	Pemasaran
511.1	Sembilan bahan pokok diantaranya beras, garam, minyak tanah, minyak goreng, sabun dll
511.2	P a s a r
511.3	Pertokoan, kaki lima, kios
511.4	Pusat perbelanjaan
512	Ekspor
512.1	Ekspor Hasil Industri
512.2	Ijin Ekspor
512.3	Pengembangan Pasar Luar Negeri
512.4	Managemen Perdagangan Internasional
512.5	Eksport Hasil Industri
512.51	Kebijakan
512.52	Pemasaran
512.6	Pemberitahuan Eksport Barang



512.7	Pengawasan Mutu Barang
512.8	Eksportir Terdaftar
512.9	Evaluasi dan pelaporan
513	Impor
513.1	Ijin Impor
513.11	Pemberian ijin
513.12	Pengendalian ijin
513.2	Standart Mata Dagang Import
513.3	Management Perdagangan Internasional
513.4	Kegiatan Import
513.41	Pembinaan Import
513.42	Pengendalian Import
513.43	Pemantauan Import
513.5	Faktor-faktor Pendukung
513.6	Pengawasan Mutu Barang Import
513.7	Penyaluran Kegiatan Import
513.71	Bahan Konsumsi
513.72	Bahan Baku
513.73	Bahan Penolong
513.8	Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Import
514	Perdagangan Antar Pulau
514.1	Kerjasama Bahan Baku
514.2	Industri Pemasaran
514.3	Kontrak
515	Pengembangan Potensi Perdagangan Luar Negeri
515.1	Promosi dan Informasi
515.2	Pameran
515.3	Kerjasama
516	Pergudangan, termasuk tangki penyimpanan minyak goreng
516.1	Peti Kemas
516.2	Tangki Penyimpanan
517	Aneka usaha perdagangan
<b>518</b>	<b>KOPERASI</b>
518.1	Bina Usaha Koperasi
518.11	Koperasi Pertanian
518.12	Koperasi Non Pertanian
518.13	Permodalan Koperasi
518.131	Pemupukan Modal
518.132	Pemanfaatan Modal
518.133	Perbankan dan Asuransi
518.134	Permodalan Luar Koperasi
518.135	Kredit Program Umum
518.136	Kredit Program Khusus
518.14	Distribusi dan Jasa Koperasi
518.141	Distribusi Bahan Pokok
518.142	Distribusi Aneka Bahan
518.143	Distribusi Kerjasama Niaga
518.144	Jasa Angkutan
518.145	Jasa Perumahan
518.146	Aneka Jasa
518.15	Koperasi Kelistrikan, Industri dan Telekomunikasi
518.2	Bina Lembaga Koperasi
518.21	Organisasi Koperasi
518.211	Anggaran Dasar dan Akte Pendirian Koperasi

518.212	Pemberian Badan Hukum Koperasi
518.213	Penyelesaian Pembubaran Koperasi
518.214	Keragaan Koperasi
518.215	Pengakuan Koperasi Sekolah
518.216	Amalgamasi
518.217	Tertib Organisasi Koperasi
518.218	Penyelesaian Penyelesaian/Persengketaan
518.219	Bimbingan Kesadaran Hukum
518.22	Bina Hubungan Alat Kelengkapan Organisasi Koperasi
518.221	Rapat Anggota Tahunan Koperasi
518.222	Pengurus dan Badan Pemeriksa
518.223	Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)
518.224	Badan Penasehat dan Pertimbangan Koperasi Unit Desa (BPP KUD)
518.23	Bina Tata Laksana Koperasi
518.231	Klasifikasi Koperasi Pedesaan
518.232	Klasifikasi Koperasi Perkotaan
518.233	Klasifikasi Koperasi Sekunder
518.24	Administrasi Ketatalaksanaan Koperasi
518.241	Administrasi Koperasi Pedesaan
518.242	Administrasi Koperasi Perkotaan
518.243	Karyawan/Manager Koperasi
518.244	Sumber Daya Manusia
518.245	Tenaga Kerja Sukarela Terdidik (TKST)
518.246	Penyaluran Alat Sekolah
518.247	Bantuan Pemda kepada Koperasi/KUD
518.25	Akuntansi
518.251	Akuntansi Koperasi Pedesaan
518.252	Akuntansi Koperasi Perkotaan
518.253	Akuntansi Koperasi Sekunder
518.26	Pengawasan Koperasi
518.261	Pengawasan Koperasi Primer
518.262	Pengawasan Koperasi Sekunder
518.263	Koperasi Jasa Audit
518.264	Kerjasama Kantor Akuntan
518.27	Penyuluhan Koperasi
518.271	Pembinaan Kader Koperasi
518.272	Masyarakat Umum
518.273	Forum Komunikasi
518.274	Kelompok Tani
518.275	Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PKKL)
518.276	Penilaian Tingkat Nasional
518.3	Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
518.31	Pembinaan Usaha
518.311	Pembinaan Usaha Mikro
518.312	Pembinaan Usaha Kecil
518.313	Pembinaan Usaha Menengah
518.32	Pengawasan Usaha
518.321	Pengawasan Usaha Mikro
518.322	Pengawasan Usaha Kecil
518.323	Pengawasan Usaha Menengah
<b>520</b>	<b>PERTANIAN</b>
521	Tanaman Pangan
521.1	Rencana dan Program
521.11	Bimas/Inmas Termasuk Kredit

521.12	Pelaporan dan Evaluasi Pertanian
521.2	Produksi
521.21	Padi
521.22	Palawija
521.23	Hortikultura (sayuran, buah-buahan, tanaman hias)
521.24	Panen Gagal (Puso)
521.3	Sarana Usaha Pertanian
521.31	Peralatan
521.32	Meliputi traktor dan sebagainya
521.33	Pembenihan dan pembibitan
521.34	Pupuk
521.35	Irigasi Pertanian
521.36	Rehabilitasi Lahan Pertanian
521.4	Perlindungan Tanaman
521.41	Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Pangan
521.411	Penyakit Tanaman Pangan
521.412	Hama tanaman pangan
521.42	Pemberantas
521.421	Pestisida
521.422	Agensia Pengendalian Hayati
521.43	Tanah Pertanian Pangan
521.431	Persawahan
521.432	Perladangan
521.433	Kebun
521.5	Pengusaha, Petani
521.6	Lahan kritis
521.7	Pemasaran dan Promosi Pertanian
521.8	Pengembangan Sumber Daya Pertanian
<b>522</b>	<b>KEHUTANAN</b>
522.1	Perencanaan Hutan
522.11	Survey
522.111	Survey PPA
522.112	Survey Areal
522.113	Survey Pembinaan Hutan
522.114	Survey Potensi Hutan
522.12	Pendataan/Inventarisasi Areal Hutan
522.121	Data Areal Tata Guna Hutan
522.122	Data areal konservasi
522.2	Tata Guna Hutan
522.21	Tata Ruang Kawasan
522.211	Pengurusan kawasan Hutan
522.212	Penafsiran Hutan
522.213	Mutasi Hutan
522.22	Tata Hutan
522.221	Tata Hutan Sementara
522.222	Tata Hutan Tetap
522.223	Pembukaan Hutan
522.23	Pengukuran dan Pemetaan
522.3	Pengusahaan Hutan
522.31	Data Areal HPH
522.311	SK HPH
522.312	Kerja sama
522.313	Pembatalan/Penolakan
522.32	Modal dan Peralatan

522.321	Inventarisasi Logging
522.322	Inventarisasi Industri
522.323	Peralatan
522.324	Tenaga Kerja Pengusahaan Hutan
522.325	Pemegang Saham
522.326	Neraca Perusahaan
522.33	Rencana Kerja
522.331	KHPH
522.332	RKPH
522.34	Perpanjangan HPH
522.35	Produksi
522.351	Target Produksi
522.352	Produksi Kayu
522.353	Produksi Non-Kayu
522.36	Industri
522.361	Industri Kayu HPH
522.362	Industri Kayu Non-HPH
522.363	Industri Non Kayu
522.37	Pembinaan HPH
522.371	Pelanggaran dan Sanksi
522.38	Pembangunan Hutan Tanaman Industri
522.381	Hutan Tanaman Industri Pulp
522.382	HTI Pertukaran
522.39	Iuran Hutan
522.4	Sarana Usaha
522.41	Standarisasi
522.411	Kayu
522.412	Non Kayu
522.42	Pengujian Hasil Hutan
522.43	Pengembangan
522.431	Pengembangan Perusahaan
522.432	Pengembangan Pemasaran
522.44	Pemasaran Hasil Hutan
522.45	SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan), Angkutan Hasil Hutan
522.451	Sarana dan Prasarana
522.452	Pembinaan dan Peningkatan Daya Hutan
522.46	Tata Usaha Hasil Hutan
522.47	PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat)
522.5	Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam
522.51	Konservasi Jenis
522.511	Satwa yang dilindungi
522.512	Satwa yang tidak dilindungi
522.513	Lembaga Konservasi Satwa
522.514	Lembaga Konservasi Tumbuhan
522.52	Kawasan Konservasi
522.521	Cagar Alam (termasuk laut)
522.522	Suaka Margasatwa
522.523	Taman Wisata (termasuk laut)
522.524	Taman Nasional
522.525	Taman Hutan Raya/Kebun Raya
522.526	Taman Baru
522.527	Hutan Lindung
522.53	Pengkajian Lingkungan
522.531	Amdal UKL, UPL, Di Dalam Kawasan

522.532	Amdal UKL, UPL, Di Luar Kawasan
522.54	Bina Cinta Alam
522.541	Kelompok Pecinta Alam
522.542	Kader konservasi Sumber Daya Alam
522.543	Penyuluhan konservasi Sumber Daya Alam
522.544	LSM Lingkungan
522.55	Pengamanan Hutan
522.551	Jaga Wana
522.552	PPNS
522.553	Gangguan Keamanan Hutan
522.554	Bencana Alam
522.555	Kebakaran Hutan
522.556	Sengketa Hutan
522.557	Hama dan Penyakit
522.558	Pestisida dan Pupuk Tanaman Hutan
522.559	Alat dan Mesin Kehutanan
522.6	Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan
522.61	Pembenihan
522.611	Tegakan Benih
522.612	Pengadaan Benih
522.613	Pengujian dan Penyimpanan Benih
522.614	Lalu Lintas Angkutan Benih
522.615	Pembibitan
522.616	Pengada dan Pengekar Bibit Bersertifikat
522.617	Pengada dan Pengekar Bibit Tidak Bersertifikat
522.62	Tanaman Reboisasi
522.621	Lahan Kritis
522.622	Reboisasi Lahan HPH
522.623	Rehabilitasi Tanah Hutan
522.624	Konservasi Tanah dan Air
522.625	Pengendalian Perladangan
522.626	Penghijauan
522.627	Aneka Usaha Kehutanan
522.63	Perhutanan Sosial
522.631	Sutera Alam
522.632	Minyak Kayu Putih
522.633	Perlebahan
522.7	Hutan Produksi
522.71	Hutan Produksi Terbatas
522.72	Hutan Produksi yang dapat Dikonservasi
522.8	Kawasan Lindung
<b>523</b>	<b>PERIKANAN DAN KELAUTAN</b>
523.1	Rencana, Program, Statistik, Prospek dan Pelaporan bidang Perikanan dan Kelautan
523.11	Penyuluhan
523.12	Teknologi
523.2	Produksi Perikanan
523.21	Standarisasi Mutu Hasil Perikanan
523.22	Perikanan Budidaya : CBIB, CBIC
523.23	Sertifikasi Kesehatan Ikan
523.3	Usaha Perikanan
523.31	Pelatihan Nelayan
523.32	Pembinaan wanita nelayan
523.33	Fasilitas perijinan : SIUP, SIPI, SKP





































































